

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI FUNGSI LURAH DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAH
(STUDI ADMINISTRASI PENDUDUK DI KELURAHAN TELUK
BELITUNG KECAAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

OLEH :

**RIDHO AKBADILLAH
NPM : 147310673**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ridho Akbadillah
NPM : 147310673
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintah (Studi Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti).

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, 17 November 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. Monalisa, M.Si.

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ridho Akbadillah
NPM : 147310673
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintah (Studi Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 06 Desember 2021

Ketua,


Dra. Hj. Monalisa, M.Si.

Sekretaris,


Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.

Anggota.


Rizky Setiawan S.IP, M.Si.

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

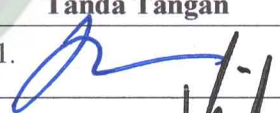
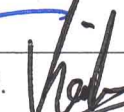
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

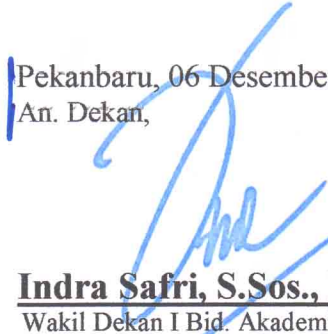
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 1650/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 03 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 06 Desember 2021 jam 10.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ridho Akbadillah
NPM : 147310673
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi :
Evaluasi Fungsi Lurah dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan (Studi Administrasi Penduduk di Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti).

Nilai Ujian : Angka : " 76.2 " ; Huruf : " B+ "
: **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Keputusan Hasil Ujian Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si	Anggota	3. 

Pekanbaru, 06 Desember 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1630 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ridho Akbadillah
N P M : 147310673
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Evaluasi Fungsi Lurah dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan (Studi Administrasi Penduduk di Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti).**

Struktur Tim :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dra. Hj. Monalisa, M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Risky Setiawan, S.IP., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 05 Desember 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ridho Akbadillah
NPM : 147310673
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintah (Studi Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021
An. Tim Penguji

Ketua



Dra. Hj. Monalisa, M.Si.

Sekretaris



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

**EVALUASI FUNGSI LURAH DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAH
(STUDI ADMINISTRASI PENDUDUK DI KELURAHAN TELUK
BELITUNG KECAAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI)**

ABSTRAK

OLEH : RIDHO AKBADILLAH

Kelurahan merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah Kelurahan, salah satu kewenangan Kelurahan melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan hal ini merupakan proses pencatatan data dan informasi penduduk Kelurahan. Administrasi Penduduk Kelurahan merupakan kegiatan pemerintah Kelurahan dalam pendataan penduduk meliputi penduduk pendatang, pindah, kematian dan lahir. Dalam menunjang pelaksanaan Administrasi Penduduk secara efektif dan efisien pemerintah Kelurahan berupaya meningkatkan pelayanan pendataan penduduk secara langsung dan kerjasama dengan RT/RW. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan khususnya Administrasi Penduduk di Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti serta faktor Penghambat dalam Pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan wawancara yaitu mendapatkan keterangan yang diperlukan melalui komunikasi lisan secara langsung dengan informan atau narasumber. Selain wawancara Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Teknik Analisa data menggunakan model analisi intraktif yaitu mereduksi data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian disajikan dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Administrasi Penduduk sudah terlaksana namun belum maksimal, dimana pemerintah Kelurahan telah melakukan kerjasama secara dengan RT/RW dalam mendata penduduk. Kesimpulan bahwa pelaksanaan administrasi penduduk masih belum didukung sarana prasarana mulai dari computer, Mesin Diesel, Jaringan internet dan angkutan operasional pendataan Kependudukan serta Sumber daya manusia yang kurang memahami pelaksanaan Administrasi Penduduk. Namun penulis menyarankan Pemerintah Kelurahan Teluk Belitung agar memberikan pelayanan administrasi kependudukan dengan optimal serta menyediakan sarana prasarana pendukung pelaksanaan Administrasi Penduduk dan melakukan kerjasama dengan RT/RW dan masyarakat Kelurahan.

Kata Kunci : Evaluasi, Penyelenggaraan, Administrasi Penduduk.

**EVALUATION OF THE FUNCTION OF THE VILLAGE HEAD IN THE
ADMINISTRATION OF GOVERNMENT (STUDY OF POPULATION
ADMINISTRATION IN TELUK BELITUNG DISTRICT, MERBAU
DISTRICT, MERANTI ISLANDS REGENCY)**

ABSTRACT

BY : RIDHO AKBADILLAH

Kelurahan is a community unit that has the authority to manage the interests of the local community which is carried out directly by the Kelurahan government, One of the powers of the Kelurahan is to provide population administration services, namely the process of recording data and information for Kelurahan residents. Village Population Administration is the activity of the Kelurahan government in population data collection including immigrants, relocations, deaths and births. In supporting the implementation of Population Administration effectively and efficiently, the Kelurahan government seeks to improve population data collection services directly and in collaboration with RT/RW. This study aims to determine the implementation of village administration, especially population administration in Teluk Belitung Village, Merbau District, Meranti Islands Regency and the inhibiting factors in its implementation. The research method used is descriptive qualitative, where the data collection technique used is by using interviews, namely getting the necessary information through direct oral communication with informants or resource persons. In addition to interviews, data collection techniques used are observation and documentation. The data analysis technique uses an interactive analysis model, namely reducing the data that has been collected and then presented and then drawn conclusions. From the results of the study, it is known that the Implementation of Population Administration has been carried out but has not been maximized, where the Kelurahan government has collaborated with RT/RW in population data collection. In conclusion, the implementation of population administration is still not supported by infrastructure facilities ranging from computers, diesel engines, internet networks and operational transportation of population data collection and human resources who do not understand the implementation of population administration. However, the authors suggest to the Teluk Belitung Regency Government to provide optimal population administration services and provide infrastructure to support the implementation of Population Administration and cooperate with RT/RW and the Kelurahan community.

Keywords: Evaluation, Implementation, Population Administration.

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Ridho Akbadillah
NPM : 147310673
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintah (Studi Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 November 2021



Ridho Akbadillah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada Pasal 1 yang mana Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah sebagaimana dimaksud diangkat oleh Bupati/walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Lurah sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintahan dalam Pasal 5 Lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Salah satu fungsi kelurahan adalah memberikan pelayanan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan publik. Pelayanan masyarakat yang dibutuhkan dikelurahan yaitu berkaitan dengan administrasi kependudukan yang meliputi data-data dan dokumen kependudukan serta legalisasi surat-surat yang dibutuhkan warga. Perangkat kelurahan bertugas untuk membantu lurah dalam melaksanakan fungsi kelurahan, yaitu menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan publik.

Administrasi Penduduk adalah sebagai pendataan penduduk di suatu Daerah yang bertujuan pencatatan dan pendataan setiap penduduk yang ada di Desa/Kelurahan yang meliputi penduduk pendatang, pindah, kematian dan lahir.

Kelurahan Teluk Belitung adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Teluk Belitung Kabupaten Kepulauan Meranti Jumlah penduduk Kelurahan Teluk Belitung yang memiliki jumlah penduduk yang berubah mulai dari penduduk pendatang, pindah, kematian dan lahir. Tentunya ini menjadi fungsi lurah didalam penagannya sehingga lurah dituntut memiliki kemampuan dalam melaksanakan Administrasi penduduk bagi masyarakat dan koordinasi dengan RT/RW di tengah masyarakat sehingga masyarakat dapat terdata.

Adapun jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Teluk Belitung Kabupaten Kepulauan Meranti September Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 : Jumlah Penduduk Kelurahan Teluk Belitung Kabupaten Kepulauan Meranti September Tahun 2020

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	4.186
2	Perempuan	3.220
	Jumlah	7.406

Sumber : Kantor Lurah Teluk Belitung, 2021

Berdasarkan tabel diatas Jumlah Penduduk Kelurahan Teluk Belitung Kabupaten Kepulauan Meranti September Tahun 2020 dimana diketahui penduduk Laki-laki sebanyak 4.186, Perempuan 3.220 dengan jumlah penduduk secara menyeluruh sebanyak 7.406 jiwa.

Kelurahan Teluk Belitung merupakan suatu instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung dalam pengurusan administrasi yang diperlukan oleh masyarakat, adapun pelayanan yang disediakan Kelurahan Teluk Belitung yang tetap di urus oleh masyarakat yaitu :

1. Pelayanan KTP
2. Pelayanan Kartu keluarga (KK)
3. Pelayanan Surat Tanah
4. Pelayanan Akta Kelahiran
5. Pelayanan Akta Kematian
6. Pelayanan Akta nikah Non Muslim
7. Pelayanan surat keterangan pindah
8. Pelayanan keterangan pendatang baru

Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah Daerah khususnya aparat pemerintah Kelurahan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Fungsi undang-undang tersebut selaras dengan tuntutan masyarakat

yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta berwawasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kelurahan berkoordinasi langsung terhadap Lembaga Masyarakat kelurahan dalam pelaksana administrasi kependudukan di tingkat RT/RW, salah satu lembaga kemasyarakatan adalah Rukun Tetangga (RT). Lembaga yang ada dilingkungan kelurahan, lembaga ini berperan penting sebagai lembaga sosial dan perpanjangan tangan dari kelurahan.

Menurut pengamat penulis, upaya yang dilakukan Kelurahan Teluk Belitung untuk melaksanakan fungsi kelurahan demi maksimalnya pelayanan kepada masyarakat, sudah berjalan sebagaimana mestinya hanya saja pelaksanaannya saja yang belum maksimal. Hal ini dikarenakan perangkat kelurahan sebagian belum menekuni kegiatan sehari-harinya. Mereka kurang tanggap dalam melakukan pekerjaannya sehingga terkesan aparaturnya kelurahan bekerja tanpa adanya pencapaian kinerja yang lebih baik.

Penjelasan di atas bahwasanya Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan suatu perkumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu tempat yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka, kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh pemerintah, dalam hal ini camat/lurah/kepala Desa harus senantiasa melakukan pembinaan, pembuatan laporan, melakukan penyuluhan-penyuluhan, membuat peraturan tentang lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan dibentuk pembinaan lainnya. Adapun berikut Pelayanan administrasi penduduk yang dilaksanakan di Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti berikut :

Tabel. I.2 : Jumlah Penduduk terdaftar dan tidak terdaftar di Kelurahan teluk Beilitung, Kecaamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti 2018-2020

Tahun 2018			
No	Perincian	Jumlah Penduduk	
		Terdaftar	Tidak Terdaftar
1	Kelahiran	12	11
2	Kematian	12	14
3	Pendatang	9	17
4	Pindah	24	8
Jumlah		57	40
Tahun 2019			
No	Perincian	Jumlah Penduduk	
		Terdaftar	Tidak Terdaftar
1	Kelahiran	14	9
2	Kematian	10	11
3	Pendatang	17	19
4	Pindah	12	15
Jumlah		53	54
Tahun 2020			
No	Perincian	Jumlah Penduduk	
		Terdaftar	Tidak Terdaftar
1	Kelahiran	19	17
2	Kematian	14	9
3	Pendatang	17	19
4	Pindah	9	11
Jumlah		59	56

Sumber :Olahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Penduduk terdaftar dan tidak terdaftar di Kelurahan teluk Beilitung, Kecaamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti 2018-2020 dimana jumlah penduduk terdaftar tahun 2018 sebanyak 57 orang dan tidak terdaftar sebanyak 40 orang, Tahun 2019 terdaftar sebanyak 53 orang sedangkan tidak terdaftar sebanyak 54 orang, dan tahun 2020 terdaftar sebanyak 59 orang sedangkan tidak terdaftar sebanyak 56 orang meliputi Kelahiran, Kematian, Pendatang, dan Pindah, sehingga secara keseluruhan yang terdaftar sebanyak 223 orang terdaftar sedangkan yang tidak terdaftar 55 orang. Hal ini seharusnya kepala Desa dengan lembaga Desa RT/RW dapat mendata penduduk

disekitarnya secara detail sehingga kejelasan penduduk terdaftar di buku administrasi kependudukan.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kinerja Kelurahan Teluk Belitung masih cukup lemah dalam penerapannya sebagai birokrasi di kelurahan. Dimana dalam pelaksanaan fungsi kelurahan kurangnya inisiatif yang ada dalam diri aparat Kelurahan Teluk Belitung dalam melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan ataupun yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi Kelurahan. instruksi langsung dari lurah selaku pemimpin dan petugas dalam memberikan pelayanan masih belum maksimal.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa banyaknya warga pendatang yang tidak terdaftar dalam buku Buku Administrasi Penduduk Desa hal ini dikarenakan Kelurahan belum berkoordinasi terhadap RT, RW dalam pelaksanaan Administrasi Penduduk sehingga belum adanya pengarah dan ketegasan yang diberikan terhadap masyarakat setempat dalam pelaporan dan pendataan identitas penduduk masyarakat kelurahan. Menyikapi hal tersebut adapun fenomena di dalam Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti) sebagai berikut :

1. Diketahui bahwa belum maksimalnya fungsi Lurah dalam pelayanan masyarakat pada Administrasi Penduduk terutama layanan penduduk yang lahir, meninggal, pindah dan pendatang baru, sehingga masih banyak penduduk ditemui belum terdata di dalam buku Administrasi Penduduk.

2. Diketahui bahwa belum maksimalnya Koordinasi Lurah dengan Lembaga masyarakat Kelurahan yaitu RT/RW di dalam memberikan sosialisasi terkait upaya pelaporan bagi setiap penduduk penduduk Kelahiran, Kematian, Pendetang dan Pindah.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintah (Studi Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Belitung Kecaamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan kenyataan dan latar belakang di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dan mengangkat sebuah permasalahan tersebut menjadi suatu bahan penelitian dengan judul “Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintah (Studi Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Belitung Kecaamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintah (Studi Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Belitung Kecaamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)

- b. Untuk mengetahui faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna teoritis, yakni diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna untuk melengkapi dan mengembangkan ilmu Pemerintahan dan dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintah (Studi Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)
- b. Guna akademis, guna untuk meningkatkan dan memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang disiplin ilmu administrasi negara juga dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintah (Studi Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)
- c. Guna empiris, yakni hasil penelitian ini merupakan salah satu bahan masukan dalam melaksanakan Tugas Lurah Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan;

Menurut Rosental dalam Syafiie (2013;34) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur–Struktur dan proses–proses pemerintahan umum.

Menurut H.A Barsz dalam Syafiie (2013;35) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Pemerintah secara umum (dalam Maulidiah 2014;1-2) adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas–tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat – alat kelengkapan Negara yang berperan membantu pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas – tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas – tugas pemerintahan yang dalam ini adalah penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Menurut Yusri Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

2. Konsep Pembinaan

Secara substantif, menurut rasyid (2005:48), tugas pokok pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok, yakni :

- 1 Pelayanan (service)
- 2 Pemberdayaan (empowerment)
- 3 Pembangunan (development)

Pembinaan sebagai suatu konsep yang selalu dipakai untuk memacu pertumbuhan pembangunan dberbagai sektor selalu mendapat perhatiandari pemerintah.hal ini tentu disebabkan karena pemerintah bertanggung jawab

terhadap penyelenggaraan pembangunan sementara pembangunan akan berhasil apabila masyarakat tahu dan mengerti apa yang seharusnya ia lakukan sebagai bagian dari penggerak pembangunan.

Pembinaan Menurut Santoso (2000:52) adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai mentaati peraturan yang berlaku.

Menurut Santoso (2000:57) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain adalah :

1. Penyuluhan
2. Pengarahan
3. Bimbingan

Menurut Thoha (2008; 207) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan kemajuan, peningkatan dari pertumbuhan suatu organisasi dengan menggabungkan kata tersebut organisasi dan pembinaan dapat disimpulkan bahwa pembinaan organisasi meliputi :

1. Tindakan
2. Proses
3. Hasil tindakan lebih lanjut,
4. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi.

3. Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Otonomi Daerah yang artinya Daerah Otonomi yaitu kesatuan masyarakat akan hukum yang batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tanganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Syafiie (2011;56).

Cheema dan Rondinelli (dalam Skripsi Saddam, 2015;34) mendefenisikan desentralisasi sebagai "*The transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local government or non-government organizations.*" Defenisi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan Desentralisasi adalah tidak semata-mata sebuah pemindahan urusan atau administrasi, malah lebih luas, ia juga meliputi proses perencanaan, pembuatan keputusan dan pertanggungjawaban

Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007;229) megatakan azas Desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tanganya sendiri.

Dari pendapat Cheema dan Rondinelli, Smith serta Edmond tersebut, Yusoff dan Yusran dalam bukunya (2007;33) merumuskan bahwa Desentralisasi adalah suatu pengalihan kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada unit – unit lokal dibawahnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga bukan pemerintah

4. Konsep Kelurahan

Kansil, (2003:190) mendefinisikan kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Sutupo, (2001;10) kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang diajukan untuk kepentingan masyarakat, kebijakan public bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat.

Nugroho, (2006;25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang atau golongan. Kebijakan (*policy*) dalam pemerintahan hendaknya dibedakan dengan kebijakan (*wisdom*) karena kebijakan merupakan aturan yang sudah di tetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang.

Disamping itu kebijakan (*policy*) dapat juga kita katakan atau kita pergunakan untuk menuju perilaku seseorang, actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) ataupun sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. (Inu Kencana, 2005;105).

Dunn, (2003;22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling

bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penelitian kebijakan.

Menurut Santoso, (1995;60) pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain sebagai:

1. Penyuluhan

Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan, penyuluhan tidak sekadar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Pengarahan

pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu, atau perintah resmi seseorang pimpinan kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan lurah untuk memberikan arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan Lembaga Kemasyarakatan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun indikatornya adalah :

- a. Memberikan arahan yang berhubungan dalam bidang pemerintahan.
- b. Mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan Kelurahan.

3. Bimbingan

Bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Sebuah bimbingan harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Dalam melakukan bimbingan, harus dilakukan secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan yang di inginkan. Bimbingan

merupakan usaha-usaha yang dilakukan Lurah untuk mengajak, mengiring serta mendorong agar Lembaga Kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun indikatornya adalah :

- a. Kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis.
- b. Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
- c. Adanya diskusi atau Tanya jawab antara pembimbing dan yang dibimbing.

5. Konsep Lembaga Kemasyarakatan.

Soekanto, 2001;162) mengatakan lembaga kemasyarakatan adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat.

Selanjutnya Soekanto (2002;197) menjelaskan Lembaga Kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia apa yang dengan tepat menggambarkan isi *social-institution* tersebut. Ada yang menggunakan istilah “pranata sosial”, tetapi *social-institution* menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada system tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Istilah lain yang diusulkan adalah “ bangunan sosial “ yang mungkin merupakan terjemahan dari

istilah *Soziale-Gebilde* (bahasa Jerman), yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan *social-institution* tersebut.

Adapun jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan dijelaskan pada pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penegak PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

6. Pelayanan Publik

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Wasistiono (2001:51-52) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Selanjutnya menurut Wasistiono, (2003:41) bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah tugas pokok pemerintah yang penting. Oleh sebab itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai pelayanan masyarakat (*public servant*).

Menurut Ratminto dalam Winarsih (2005:141) pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat diwujudkan apabila dalam lingkungan internal organisasi penyelenggara pelayanan terdapat 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat khususnya pengguna jasa.

2. Kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan, dan
3. Sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan pengguna jasa.

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris “*public*” yang berarti umum, masyarakat, dan negara. Istilah publik di Indonesia telah menjadi bahasa baku yang dapat diterima. “Publik” di Indonesia dapat berarti umum, orang banyak, dan ramai. Istilah publik juga turut dijelaskan oleh Cutlip dan Center dalam Syafri (2012;15) yang mengatakan bahwasanya publik merupakan kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan.

7. Konsep Evaluasi

Ndraha (2005:102) juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku,treatment) tolak ukur adalah *before*
2. Model kelompok *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.
3. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberiperlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Menurut Dunn, (2003:608) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung criteria sebagai berikut:

1. Efektivitas yaitu keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
3. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan
4. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Nurcholis (2007:277) mengatakan ada beberapa aspek umum dalam penilaian (evaluasi) yaitu *Input*, *proses*, *output*, dan *outcome*, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Input merupakan masukan-masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : Sumber Daya Pendukung dan bahan-bahan dasar pendukung.
2. Proses merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan indikator : Tepat sasaran atau tidak, tepat guna atau tidak dan efisien atau tidak.

3. *Output* yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : tepat tidaknya sasaran yang dituju, berapa besar sasaran yang tercapai, seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani, seberapa besar kelompok yang terlibat.
4. *Outcome* yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, dengan indikator : ada atau tidaknya perubahan pada target/sasaran, seberapa besar perubahan kelompok sasaran, seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dini Annisa Tifany (2015)	Fungsi Lurah dalam Pelayanan Administrasi Penduduk di Kelurahan Kota Pekanbaru Kota.	Fungsi Lurah, Metode Penelitian Kuantitatif.	Tujuan Penelitian, Variabel lain yang berbeda, Lokasi Penelitian, Indikator Penelitian.
2	Amalia Pertiwi (2017)	Analisis Pelaksanaan Fungsi Lurah Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan	Indikator, Metode Penelitian Kuantitatif.	Variabel yang diteliti, Populasi dan Sampel, Lokasi Penelitian.

		Sukajadi Kota Pekanbaru.		
3	Ichwann Hastona (2015)	Fungsi Pembinaan Lurah Terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam pelayanan administrasi masyarakat di Kelurahan Tangerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014.	Teori Fungsi Lurah, Metode Penelitian Kuantitatif.	Tujuan Penelitian, Populasi dan Sampel, Lokasi Penelitian, Metode Penelitian, Indikator Penelitian.
4	Junaidi (2014)	Peran Lurah dalam pelayanan Administrasi Penduduk di Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten pelalawan.	Teori Pembinaan, Metode Penelitian Kuantitatif.	Tujuan Penelitian, Populasi dan Sampel, Lokasi Penelitian, Metode Penelitian, Indikator Penelitian.
5	Hardy Yulisman (2014)	Peran Lurah pelayanan Administrasi Penduduk Kelurahan rawangkao Kecamatan Rawangkao Kabupaten Siak.	Teori Pembinaan,	Metode Penelitian Kuantitatif. Tujuan Penelitian, Populasi dan Sampel, Lokasi Penelitian, Metode Penelitian, Indikator Penelitian.

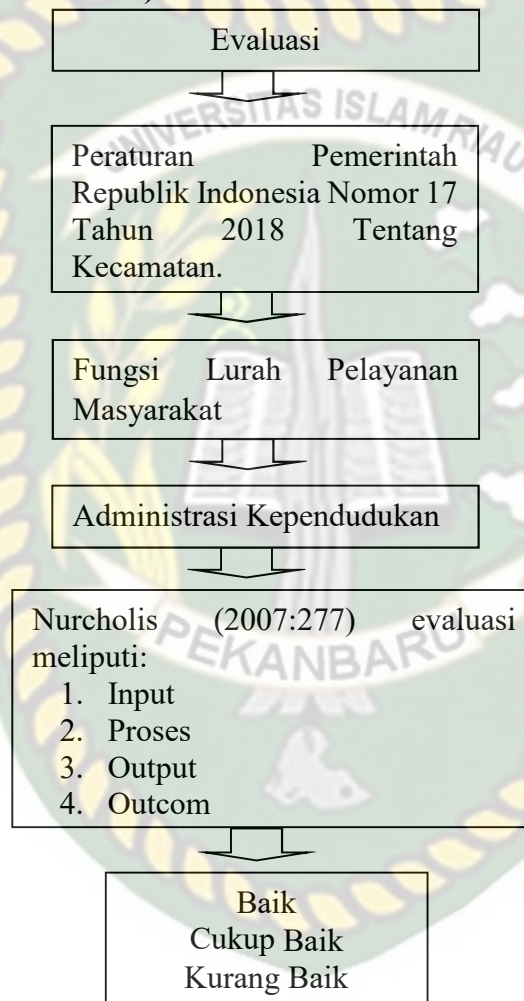
Sumber : *Olahan Data Penelitian, 2021*

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran ini adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan meneliti masalah yang dihadapi serta mekanisme hubungan lembaga sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variable penelitian dengan indikator-indikator penentu, berdasarkan konsep

maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikiran dari penelitian dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut.

Gambar II.1. Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintah (Studi Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti)



Sumber: modifikasi penulis, 2021

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran persepsi atas istilah yang digunakan maka diberikan konsep yang dioperasioanalkan sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
2. Pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.
3. Pelaksanaan fungsi lurah yang dimaksudkan disini pelayanan terhadap masyarakat yaitu pelayanan dalam melaksanakan Administrasi Kependudukan.
4. Kelurahan dalam penelitian ini adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
Adapun indikator yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah :
5. Input merupakan masukan-masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : Sumber Daya Pendukung dan bahan-bahan dasar pendukung.
6. Proses merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan indikator : Tepat sasaran atau tidak, tepat guna atau tidak dan efisien atau tidak.
7. *Output* yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : tepat tidaknya sasaran yang dituju, berapa besar sasasaran yang tercakup, seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani, seberapa besar kelompok yang terlibat
8. *Outcome* yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, dengan indikator : ada atau tidaknya perubahan pada target/sasaran, seberapa besar

perubahan kelompok sasaran, seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai

D. Operasional Variabel

Tabel II. 2: Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintah (Studi Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti)

Konsep	Variabel Penelitian	Indikator	Item
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelencaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan cristine, 2008:190).	Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintah (Studi Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti)	Input	a. Ketersediaan SDM dalam Sosialisasi Administrasi Penduduk. b. Sarana dan Prasarana.
		Proses	a. Pelayanan Administrasi kependudukan tepat sasaran, tepat guna dan efisien. b. Pendataan Jumlah penduduk terdaftar, pindah, dan pendatang dalam satu bulan tepat sasaran, tepat guna dan efisien.
		Output	a. Terdatanya jumlah penduduk secara keseluruhan. b. Hasil laporan Kependudukan.
		Outcome	a. Buku administrasi penduduk sumber kebijakan pemerintah Desa. b. Tergambarnya Potensi Desa

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dikarenakan Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Penduduk belum terlaksana dengan maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang belum terdata.

C. Key Informan dan Informan

Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam intraksi social yang sedang diteliti (Suryanto 2005:171).

Dalam keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu untuk memilih beberapa informan yang penulis piker cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Adapun Key Informan dan Informan didalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel III. 1: Key Informan dan Informan

NO	Key Informan		Keterangan
	Nama	Jabatan	
1	Harisman	Lurah	Kantor Lurah
	Informan		
	Nama	Jabatan	
1	Junaidi	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kantor Lurah
2	Ali Mulyadi	Ketua BPD	
3	Hermansyah	Ketua RT 001	Lembaga masyarakat Kelurahan
4	Sutanto	Ketua RT 002	Lembaga masyarakat Kelurahan
5	Darwin	Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Teluk Belitung
6	Saputra	Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Teluk Belitung
Jumlah			7 orang

Sumber; Olahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas Key Informan dan Informan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Lurah, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Ketua RT Masyarakat Kelurahan Teluk Belitung sebanyak 6 Orang.

D. Teknik Penarikan Key informan dan Informan

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan Key Informan dan Informan, maka untuk menentukan Key informan dan informan pada Lurah, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Ketua BPD, Ketua RT Masyarakat Kelurahan Teluk Belitung menggunakan Teknik sensus dikarenakan jumlahnya sedikit sehingga populasi dijadikan infoman penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Tugas Lurah Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dalam Administrasi Penduduk.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap yang di perlukan penulis dalam penelitian ini, maka di gunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan :

1. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

2. Kuesioner

Kuesioner yakni pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis dan diberikan kepada responden. Sehingga reponden dapat menjawab pertanyaan yang diberikan sesuai dengan pilihan objektif yang

disediakan juga menjawabnya secara tertulis yang tidak menggunakan pilihan obyektif.

3. Wawancara

Adalah cara mengumpulkan data dengan mengadakan Tanya jawab langsung dengan responden untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden wawancara dilakukan terhadap Lurah, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Ketua BPD, Ketua RT, dan Masyarakat Kelurahan Teluk Belitung.

4. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data primer dan skunder yang di perlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut di kelompokkan sesuai dengan keperluan dan kegunaan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan keseluruhan data yang di peroleh untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci bagaimana Tugas Lurah Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dalam Administrasi Penduduk untuk menarik sebuah kesimpulan.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2021																											
		Juli				Juni				Agustus				Oktober				November				Desember							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP					■																							
3	Revisi UP						■																						
4	Revisi Quisioner							■	■																				
5	Rekomendasi Survei											■	■																
6	Survei Lapangan													■	■	■	■												
7	Analisis Data																												
8	Penyusunan Laporan hasil Penelitian (Skripsi)																												
9	Konsultasi Revisi Skripsi																									■	■	■	■
10	Ujian Konfrensisif Skripsi																											■	
11	Revisi Skripsi																												■
12	Penggandaan Skripsi																												■

Keterangan : Jadwal penelitian sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan sesuai ketentuan penelitian, 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

Kecamatan merbau pada saat itu disebut Distrik Merbau dengan Ibu Negerinya Teluk Belitung dibawah Onder Distrik Tebing Tinggi, permulaan kemerdekaan Republik Indonesia Distrik Merbau Menjadi Kecamatan Merbau dibawah kewedanaan Selat Panjang. Berdasarkan undang-undang No.12 tahun 1996 lahirlah kabupaten bengkalis yang berada dalam wilayah propinsi Sumatera Tengah dan setelah propinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi 3 (tiga) propinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi Dan Riau maka lahir pula propinsi Riau berdasarkan undang-undang nomor 61 Tahun 1958 dan masuklah kabupaten bengkalis kedalam propinsi Riau, sejak lahirnya kabupaten bengkalis maka kecamatan merbau lepas dari kewedanaan Selat Panjang langsung dibawah kabupaten bengkalis. Letak Geografis dan Demografis Batas wilayah:

1. Utara: Kabupaten bengkalis
2. Selatan: Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kabupaten Siak
3. Barat: Kabupaten Siak
4. Timur: Pulau Merbau

Kecamatan Merbau meliputi secara keseluruhan Pulau Padang seluas 1.348,91 km² atau ± 110.000 ha. Pulau Padang merupakan lahan/tanah rawa gambut dengan ketebalan gambut mencapai 6 meter lebih. Di barat Pulau Padang terdapat Sumatera, di timurnya ada Pulau Merbau, di tenggara ada Pulau Rantau, dan di seberang utara ada Pulau Bengkalis. Panjang Pulau

Padang dari utara ke selatan adalah (\pm) 60 km, lebarnya (\pm) 29 km dan seluruhnya dataran rendah. Sebelum pemekaran, Kecamatan Merbau terdiri dari Pulau Padang, Pulau Merbau dan Pulau Dedap. Dan setelah pemekaran Kecamatan Merbau tinggal Pulau Padang dan pulau Dedap. Sedangkan Pulau Merbau menjadi kecamatan Pulau Merbau tersendiri.

B. Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti

Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah:

- (1) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana.
- (2) Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.
- (3) Tugas Lurah meliputi
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam penelitian tentang Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintah (Studi Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti). Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum laki-laki, hal ini lebih rinci bahwa berperan dalam kegiatan pelayanan di Kantor Lurah Bagan Hulu dalam pindah penduduk laki-laki sebanyak 6 orang.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun hal ini tidak bias di ungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola pikirnya tergantung usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu Saputra, 37 Tahun, Darwin 38 Tahun, Sutanto 39 tahun, Hermansyah 40 Tahu, Junaidi 41 tahun, Ali Mulyadi 42 tahun, Harisman 46 tahun, dan. hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-35	-	-
2	36-40	4	57%
3	41-45	1	14%
4	46-50	2	28%
Jumlah		7	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan table di atas diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 7 orang dijadikan informan sebanyak 4 orang berusia 36-40 atau 57%, 1 orang berusia 41-45 atau 14%, dan 2 orang berusia 46-50 atau 28%.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijadikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan informan cukup mengetahui pelaksanaan kegiatan dan bentuk pembinaan yang diterima dan dilaksanakan.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan pernah terlepas dari tingkat Pendidikan yang pernah dilalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup variative mulai dari jenjang Pendidikan Diploma 3 sebanyak 1 orang, tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang, dan tingkat Pendidikan Pascasarjana sebanyak 1 orang. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Harisman	Lurah	S1
2	Junaidi	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	S1
3	Hermansyah	Ketua RT	SMA
4	Sutanto	Ketua RT	SMA
5	Darwin	Masyarakat	SMA
6	Saputra	Masyarakat	SMA

Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 2 Orang, SMA sebanyak 4 orang.

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dengan optimal sesuai dengan standar Operasional Prodsedur dan tugas dan fungsi kinerja pegawai kelurahan dari waktu pemberian pelayanan hingga pendataan penduduk pindah, pendatang, lahir dan meninggal.

Pelaksanaan penyebaran wawancara yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingkat analisis yang akan diberikan dalam menilai.

**B. Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintah
(Studi Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan
Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti)**

Kelurahan Teluk Belitung merupakan suatu instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung dalam pengurusan administrasi yang diperlukan oleh masyarakat, adapun pelayanan yang disediakan Kelurahan Teluk Belitung yang tetap di urus oleh masyarakat yaitu :

1. Pelayanan KTP
2. Pelayanan Kartu keluarga (KK)
3. Pelayanan Surat Tanah
4. Pelayanan Akta Kelahiran
5. Pelayanan Akta Kematian
6. Pelayanan Akta nikah Non Muslim
7. Pelayanan surat keterangan pindah
8. Pelayanan keterangan pendatang baru

Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah Daerah khususnya aparat pemerintah Kelurahan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Fungsi undang-undang tersebut selaras dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta berwawasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kelurahan berkoordinasi langsung terhadap Lembaga Masyarakat kelurahan dalam pelaksana administrasi kependudukan di tingkat RT/RW, salah satu lembaga kemasyarakatan adalah Rukun Tetangga (RT). Lembaga yang ada dilingkungan kelurahan, lembaga ini berperan penting sebagai lembaga sosial dan perpanjangan tangan dari kelurahan.

Menurut pengamat penulis, upaya yang dilakukan Kelurahan Teluk Belitung untuk melaksanakan fungsi kelurahan demi maksimalnya pelayanan kepada masyarakat, sudah berjalan sebagaimana mestinya hanya saja pelaksanaannya saja yang belum maksimal. Hal ini dikarenakan perangkat kelurahan sebagian belum menekuni kegiatan sehari-harinya. Mereka kurang tanggap dalam melakukan pekerjaannya sehingga terkesan aparat kelurahan bekerja tanpa adanya pencapaian kinerja yang lebih baik.

Penjelasan di atas bahwasanya Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan suatu perkumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu tempat yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka, kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh pemerintah, dalam hal ini camat/lurah/kepala Desa harus senantiasa melakukan pembinaan, pembuatan

laporan, melakukan penyuluhan-penyuluhan, membuat peraturan tentang lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan dibentuk pembinaan lainnya.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kinerja Kelurahan Teluk Belitung masih cukup lemah dalam penerapannya sebagai birokrasi di kelurahan. Dimana dalam pelaksanaan fungsi kelurahan kurangnya inisiatif yang ada dalam diri aparat Kelurahan Teluk Belitung dalam melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan ataupun yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi Kelurahan. instruksi langsung dari lurah selaku pemimpin dan petugas dalam memberikan pelayanan masih belum maksimal.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa banyaknya warga pendatang yang tidak terdaftar dalam buku Buku Administrasi Penduduk Desa hal ini dikarenakan Kelurahan belum berkoordinasi terhadap RT, RW dalam pelaksanaan Administrasi Penduduk sehingga belum adanya pengarah dan ketegasan yang diberikan terhadap masyarakat setempat dalam pelaporan dan pendataan identitas penduduk masyarakat kelurahan.

Adapun berikut teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah evaluasi menurut Nurcholis (2007:277) dimana indikator-indikator tersebut meliputi :

1. Input
2. Proses
3. *Output*
4. *Outcom*

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara

kepada 6 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Berikut Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Input

Input merupakan masukan-masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, dengan indikator Sumber Daya Pendukung dan bahan-bahan dasar pendukung. Dalam hal ini Sumberdaya Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan Administrasi Kependudukan dengan meningkatkan tertip admistrasi Pemerintah dengan melakukan sosialisasi pentingnya Administrasi kependuduka Kelurahan melalui musywarah Kelurahan, rembuk adat, perkumpulan suku akan tetapi belum terlaksana secara maksimal. Upaya tersebut di atas dilakukan diharapkan dapat meningkatkan tujuan tertib administrasi kependudukan di Kelurahan teluk Beilitung, Kecaamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, namun beberapa hal seringkali menjadi penghambat untuk meciptakan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas. Beberapa hambatan yang ditemukan seperti, Minimnya kehadiran masyarakat dalam mengikuti setiap penyuluhan yang dilakukan oleh pegawai kelurahan. Jumlah kehadiran masyarakat yang hadir dipengaruhi oleh :

- a. Rasa apatisme dari masyarakat
- b. Kesibukan dari rutinitas sehari –hari penduduk.
- c. Sosialisasi yang kurang dan tingkat interaksi yang minim.
- d. Ruang pelayanan yang sempit sehingga masyarakat harus menunggu di luar ruangan dan menimbulkan ketidaknyamanan.

- e. Adanya biaya beban tambahan yang tidak seharusnya dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- f. Kuantitas pegawai yang minim dalam melayani masyarakat sehingga menimbulkan antrian dan proses yang cenderung lambat.
- g. Masyarakat belum sepenuhnya memahami kelengkapan berkas dokumen yang menjadi syarat dalam proses pelayanan administrasi kependudukan.

Pelaksanaan Administrasi kependudukan tidak terlepas dari dukungan Lembaga masyarakat itu sendiri guna menyelaraskan setiap Tugas Pemerintah Kelurahan yang berdasarkan tugas pembantuan terhadap Lembaga Masyarakat Kelurahan, Pelaksanaan Administrasi Kelurahan bersama pemerintah Kelurahan dengan lembaga Masyarakat Kelurahan yaitu RT didalam melakukan Tertib data kependudukan.

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam Sosialisasi Administrasi Penduduk

Ketersediaan SDM didalam pelaksanaan Administrasi kependudukan di Kelurahan tidak terlepas dari kerjasama dengan lembaga dan masyarakat itu sendiri dengan melakukan sosialisasi dan musyawarah didalam tertibnya Administrasi kependudukan masyarakat Kelurahan, akan tetapi pada kenyataannya dukungan lembaga Pemerintah Kelurahan belum memberikan pelayanan dengan baik dan secara merata terkait pelayanan Administrasi Kelurahan terhadap masyarakat setempat sehingga masyarakat enggan untuk melakukan pengurusan Administrasi kependudukan yang cenderung berbelit-belit dan pelayanan yang lama dan adanya pembiayaan didalam pengurusan sehingga masyarakat banyak yang tidak

melakukan kepengurusan tertib Administrasi Kependudukan. Berikut hasil wawancara dengan Harisman, selaku Lurah dan Junaidi selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung sebagai berikut:

Sejauh ini Kami dari pihak pemerintah Kelurahan sudah melakukan sosialisasi dengan mengajak masyarakat didalam untuk selalu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan akan tertibnya Administrasi Kependudukan, akan tetapi masyarakat masih byak yang enggan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan, contohnya ketika sudah diberikan undangan melalui Lembaga Masyarakat Kelurahan RT masyarakat masih banyak dengan berbagai alasan tidak dapat hadir. (Harisman selaku Lurah Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah Kelurahan telah melaakukan sosialisasi akan masyarakat untuk tertib didalam Administrasi Kependudukan masyarakat Kelurahan. Begitu juga wawancara dengan Junaidi selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung sebagai berikut:

Pemerintah Kelurahan sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan akan tertibnya Administrasi Kependudukan. (Junaidi selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya kami sebagai pemerintah Kelurahan sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan tertibnya Administrasi Kependudukan, akan tetapi masyarakat masih banyak yang enggan dan ikut didalam sosialisasi pengarahan akan pentingnya administrasi kependudukan bagi masyarakat Kelurahan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Ali Mulyadi sebagai berikut:

Sejauh ini Lurah sudah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan akan tertib Administrasi Kependudukan terhadap masyarakat Kelurahan. (Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Kelurahan

Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas Lurah sudah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan akan tertib Administrasi Kependudukan terhadap masyarakat Kelurahan.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dalam pelaksanaan Adminitrasi Kependudukan. Hal ini di ungkapkan Ketua RT 001 Bapak Hermansyah sebagai berikut:

Saya sebagai Ketua RT 001 Bapak Hermansyah sudah ikut serta didalam pelaksanaan Adaministrasi Kelurahan dengan himbauan oleh Lurah dengan melakukan pengundangan terhadap masyarakat Kelurahan dengan tujuan adanya uapaya pemerintah Kelurahan terhadap masyarakat akan tertib Administrasi Kelurahan sehingga kegiatan Administrasi kependudukan Kelurahan dapat terlaksana dengan maksimal dan tepat sasaran dan masyarakat dapat melaksanakannya, akan tetapi undangan yang diberikan terhadap masyarakat hanya dengan ajakan saja melalui RT sehingga masyarakat kebanyakan banyak yang tidak hadir, yah hal ini saya sebagai Ketua RT 001 Bapak Hermansyah hanya sebatas melaksanakan tugas arahan dari Lurah saja.(Ketua RT 001 Bapak Hermansyah, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap Ketua RT 001 Bapak Hermansyah bahwa Ketua RT 001 Bapak Hermansyah sudah ikut serta didalam pengundangan terhadap masyarakat Kelurahan terhadap masyarakat akan tertib Administrasi Kelurahan sehingga kegiatan Administrasi kependudukan Kelurahan dapat terlaksana dengan maksimal dan tepat sasaran akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak hadir didalam undangan rapat tertib administrasi Kelurahan. Begitu juga Wawancara dengan RT 002 yang mengatakan :

Saya dihimbau Lurah agar memberitahukan terhadap penduduk setempat agar ikut dalam rapat Pelaksanaan Adaministrasi Kependudukan dengan

himbauan oleh Lurah dengan melakukan pengundangan terhadap masyarakat Kelurahan dengan tujuan adanya upaya pemerintah Kelurahan terhadap masyarakat akan tertib Administrasi Kelurahan sehingga kegiatan Administrasi kependudukan Kelurahan dapat terlaksana dengan maksimal dan tepat sasaran dan masyarakat dapat melaksanakannya akan tetapi undangan yang diberikan terhadap masyarakat hanya himbauan saja sehingga masyarakat kebanyakan banyak yang tidak hadir. (Ketua RT 001 Bapak Hermansyah, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas Ketua RT 002 Bapak Sutanto sudah ikut serta didalam pelaksanaan Administrasi Kelurahan dengan himbauan oleh Lurah dengan melakukan pengundangan terhadap masyarakat Kelurahan dengan tujuan adanya upaya pemerintah Kelurahan terhadap masyarakat akan tertib Administrasi Kelurahan akan tetapi undangan yang diberikan terhadap masyarakat hanya dengan ajakan saja melalui RT sehingga masyarakat kebanyakan banyak yang tidak hadir. Adapun berikut wawancara dengan masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kelurahan terhadap masyarakat didalam sosialisasi akan tertibnya administrasi kependudukan berikut wawancara dengan masyarakat bapak Darwin sebagai berikut:

Sejauh ini Sumberdaya Pemerintah Kelurahan didalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan Kelurahan melalui sosialisasi dengan mengajak masyarakat belum terlaksana sampai dengan masyarakat melainkan terhadap RT, dan RT menyampaikan terhadap masyarakat dengan melakukan pengundangan yang dilakukan melalui RT melalui himbauan saja akan tetapi tidak adanya undangan secara tertulis sehingga banyak masyarakat menyepelkan dan berpikir hanya sosialisasi biasa saja sehingga banyak masyarakat yang tidak hadir dan mengikuti kegiatan rapat yang dilaksanakan (Masyarakat Darwin hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB).

Dari hasil wawancara di atas diketahui sosialisasi administrasi kependudukan Kelurahan bahwa sosialisasi dengan mengajak masyarakat belum terlaksana sampai dengan masyarakat melainkan terhadap RT, dan RT.

Begitu juga wawancara dengan masyarakat bapak Saputra sebagai berikut:

Saya sebagai masyarakat Kelurahan Teluk Belitung bahwa Pemerintah Kelurahan melalui sosialisasi mengikuti rapat Administrasi kependudukan sudah terlaksana akan tetapi pengundangan yang dilakukan melalui RT dengan RT melakukan himbauan terhadap masyarakat akan tetapi tidak adanya undangan secara tertulis sehingga banyak masyarakat tidak mengikuti kegiatan rapat (Masyarakat Saputra hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Administrasi Kependudukan belum didukung akan Sumber Daya Pemerintah Kelurahan dan Lembaga Masyarakat Kelurahan didalam pencapaian keberhasilan Tertib Administrasi kependudukan dengan melakukan sosialisasi rapat tertentu dengan masyarakat dengan melakukan pengundangan bagi masyarakat dengan tujuan akan pelaksanaan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat. Akan tetapi terlihat kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kelurahan belum teraksana dengan maksimal dimana belum semua masyarakat yang mengikuti rapat sosialisasi hal ini dikarenakan pemerintah Kelurahan bersama Lembaga masyarakat Kelurahan belum melakukan pengundangan secara merata bagi masyarakat dan memberikan undangan secara tertulis.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa kegiatan pelaksanaan Administrasi Kependudukan oleh pemerintah Kelurahan bahwa belum terjalannya kerjasama yang dilakukan pemerintah Kelurahan didalam penetapan akan tertib Administrasi kependudukan terutama didalam sosialisasi terhadap masyarakat akan tertibnya kependataan setiap penduduk didalam tertib Administrasi Kependudukan.

b. Sarana Prasarana

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan tidak terlepas dari penyediaan Sarana prasana salah satu pendukung kegiatan pelayanan Administrasi kependudukan, pemberian pelayanan Administrasi kependudukan di Kelurahan teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti terlihat masih belum memadai sarana prasarana pendukung di Kantor Kelurahan seperti Ruang khusus pelayanan, Loker penerima tamu dan pamflet info akan pengurusan setiap Administrasi Kependudukan. Berikut hasil wawancara dengan Harisman, selaku Lurah dan Junaidi selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung sebagai berikut:

Didalam pemberian pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Teluk Belitung kami sudah menyediakan sarana prasarana seperti motor pentaris didalam melakukan pendataan masyarakat, ruangan di kantor Kelurahan, ketersediaan kursi kipas angin dengan tujuan pemberian kenyamanan bagi masyarakat, memang sejauh ini belum adanya kelayakan sarana prasarana yang memadai hal ini dikarenakan kantor Kelurahan yang tersedia kecil dan sarana prasarana yang kami sediakan sederhana aja yang penting kami berusaha memberikan pelayanan dengan baik agar masyarakat senang juga dan merasa puas. (Harisman selaku Lurah Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pemerintah Kelurahan telah menyediakan sarana prasarana seperti motor pentaris didalam melakukan pendataan masyarakat, ruangan di kantor Kelurahan, ketersediaan kursi kipas angin dengan tujuan pemberian kenyamanan bagi masyarakat didalam kepengurusan Administrasi kependudukan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung sebagai berikut :

Pelayanan Administrasi Kependudukan kantor Kelurahan Teluk Belitung sudah menyediakan sarana prasarana seperti ruangan di kantor Kelurahan, ketersediaan kursi kipas angin dengan tujuan pemberian

kenyaman bagi masyarakat bagi kepengurusan Administrasi kependudukan. (Junaidi selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah Kelurahan sudah memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menyediakan sarana prasarana seperti ruangan di kantor Kelurahan, ketersediaan kursi kipas angin dengan tujuan pemberian kenyamanan bagi masyarakat bagi kepengurusan Administrasi kependudukan.

Begitu juga uangkapan hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Ali Mulyadi sebagai berikut:

Sejauh ini pemerintah Kelurahan sudah menyediakan sarana prasarana seperti ruangan di kantor Kelurahan, ketersediaan kursi kipas angin agar masyarakat nyaman didalam kepengurusan Administrasi kependudukan. (Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Kelurahan Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas BPD pemerintah Kelurahan sudah menyediakan sarana prasarana seperti ruangan di kantor Kelurahan, ketersediaan kursi kipas angin didalam kepengurusan Administrasi kependudukan.

Begitu juga wawancara Ketua RT 001 Bapak Hermansyah didalam penyediaan sarana dan prasarana kantor Kelurahan didalam pelayanan Administrasi kependudukan terhadap masyarakat Kelurahan sebagi berikut:

Saya sebagai Ketua RT 001 Bapak Hermansyah sudah melihat dikantor Kelurahan bahwa pemerintah Kelurahan sudah menyediakan sarana prasarana seperti ruangan tunggu, ketersediaan kursi, kipas angin didalam kepengurusan Administrasi kependudukan (Ketua RT 001 Bapak Hermansyah, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 01 bahwa pemerintah Kelurahan sudah menyediakan sarana prasarana seperti ruangan tunggu, ketersediaan kursi, kipas angin didalam kepengurusan Administrasi kependudukan.

Begitu juga Wawancara dengan RT 002 yang mengatakan :

Sejauh ini saya melihat didalam penyediaan sarana prasarana didalam pelayanan Administrasi kependudukan bahwa kantor sudah menyediakan sarana prasarana seperti lokasi ruangan tunggu, ketersediaan kursi, kipas angin dan pegawai yang melayani didalam kepengurusan Administrasi kependudukan.

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 002 bahwa sarana prasarana didalam pelayanan Administrasi kependudukan bahwa kantor sudah menyediakan sarana prasarana seperti lokasi ruangan tunggu, ketersediaan kursi, kipas angin dan pegawai yang melayani didalam kepengurusan Administrasi kependudukan.

Berbeda dengan pendapat masyarakat terkait penyediaan sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan hal ini di ungkapkan Darwin sebagai berikut:

Sejauh sarana prasarana yang diberikan kantor Kelurahan secara khusus memberikan pelayanan Administrasi kependudukan belum tersedianya ruangan secara luas didalam melayani masyarakat sehingga masyarakat masih mengalami kewanalan didalam kepengurusan dan kursi yang tersedia masih minim sehingga masyarakat masih ditemui berdiri antri didalam kepengurusan administrasi kependudukan dan kepengurusan lainnya yang disediakan kantor Kelurahan. (Masyarakat Darwin hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa sarana prasarana yang diberikan kantor Kelurahan secara belum tersedianya ruangan yang luas didalam melayani masyarakat dan kursi yang tersedia masih minim sehingga masyarakat masih ditemui berdiri antri didalam kepengurusan administrasi kependudukan dan

kepengurusan lainnya yang disediakan kantor Kelurahan. Begitu juga diungkapkan Saputra sebagai berikut:

Penyediaan sarana prasarana oleh kantor Kelurahan terlihat belum memberikan kependudukan didalam pelayanan Administrasi kependudukan seperti ruangan pelayanan yang masih sempit dan bangku pemohon pelayanan masih belum memadai sehingga terlihat pelayanan yang diberikan belum maksimal (Masyarakat Saputra hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Penyediaan sarana prasarana oleh kantor Kelurahan didalam pelayanan Administrasi kependudukan bahwa ruangan pelayanan yang masih sempit dan bangku pemohon pelayanan masih belum memadai serta pendingin ruangan seperti AC belum tersedia sehingga terlihat pelayanan yang diberikan belum maksimal.

Dari observasi yang penulis lakukan bahwa penyediaan sarana prasana sudah cukup baik, akan tetapi ruang tunggu yang seharusnya diperlebar agar masyarakat dapat menunggu diruangan tidak atri sampai keluar dan penyediaan kursi pemohon pelayanan, dan alat pendingin yang lebih bagus seperti AC sehingga masyarakat merasa nyaman didalam kepengurusan Administrasi kependudukan dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pelaksanaan input penduduk dengan melakukan sosialisasi Administrasi Kependudukan terhadap masyarakat suda cukup baik akan tetapi sosialisasi yang diberikan belum maksimal terhadap masyarakat seharusnya adanya pemberian undangan terhadap masyarakat untuk menghadiri rapat tertib Administrasi kependudukan bukan hanya himbuan saja sehingga banyak masyarakat yang tidak mengikuti rapat yang diadakan, serta penyediaan sarana prasana sudah cukup baik, akan tetapi ruang tunggu yang

seharusnya diperlebar agar masyarakat dapat menunggu diruangan tidak atri sampai keluar dan penyediaan bangku pemohon pelayanan belum memadai sehingga masyarakat masih ditemui berdiri menunggu kepengurusan.

2. Proses

Proses merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan Tepat sasaran atau tidak, tepat guna atau tidak dan efisien atau tidak.

a. Pelayanan Administrasi kependudukan tepat sasaran, tepat guna dan efisien

Kebijakan Pemerintah Kelurahan didalam memberikan Pelayanan Administrasi kependudukan tepat sasaran, tepat guna dan efisien Dalam hal ini Pelayanan Administrasi kependudukan tepat sasaran, tepat guna dan efisien meliputi pelayanan Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga), Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili. Adapun wawancara dengan Lurah bapak Harisman sebagai berikut:

Pelayanan Administrasi Kependudukan sudah berlangsung baik dimana Kami sebagai perpanjangan tangan terhadap Disduk Capil akan kepengurusan penduduk Kelurahan seperti Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga), Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili (Lurah bapak Harisman, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kantor Kelurahan sudah melakukan pelayanan kepengurusan Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga), Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung sebagai berikut :

Sejauh ini kami sudah melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang berbentuk pelayanan kepengurusan Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga), Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili dan bekerjasama dengan Disduk Capil guna pendataannya (Junaidi selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah Kelurahan sudah memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menyediakan pelayanan kepengurusan Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga), Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili agar masyarakat dapat melakukan kepengurusan dengan Cepat.

Begitu juga ungkapkan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Ali Mulyadi didalam pelayanan yang diberikan pemerintah Kelurahan sebagai berikut:

Sejauh ini Pemerintah Kelurahan melalui penyediaan pelayanan sudah tersedia akan tetapi pencapaian pelayanan masih lamban seperti surat tembusan dari Kelurahan didalam kepengurusan e-KTP sehingga masyarakat malas didalam kepengurusan selanjutnya sampai ke disduk Capil.(Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Kelurahan Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas BPD bahwa Pemerintah Kelurahan melalui penyediaan pelayanan sudah tersedia akan tetapi pencapaian pelayanan masih lamban seperti surat tembusan dari Kelurahan didalam kepengurusan e-KTP .

Begitu juga wawancara Ketua RT 001 Bapak Hermansyah didalam pelayanan Administrasi kependudukan secara menyeluruh terhadap masyarakat Kelurahan sebagai berikut:

Saya sebagai pemerintah Kelurahan sudah memberikan pelayanan seperti pelayanan kepengurusan Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga), Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili akan tetapi memang benar kepengurusannya lama sementara surat tembusan didalam kepengurusan Administrasi kependudukan melalui kantor Kelurahan. (Ketua RT 001 Bapak Hermansyah, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 01 bahwa pemerintah Kelurahan sudah memberikan pelayanan seperti pelayanan kepengurusan Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga), Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian, Pelayanan Administrasi Surat

Pengantar Akta Perkawinan, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili akan tetapi memang benar kepengurusannya lama sementara surat tembusan didalam kepengurusan Administrasi kependudukan melalui kantor Kelurahan.

Begitu juga Wawancara dengan RT 002 yang mengatakan :

Sejauh kantor Kelurahan sudah memberikan pelayanan sebagai perpanjangan tangan terhadap Disduk Capil dengan pelayanan kepengurusan Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga), Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili. Akan tetapi lambatnya tembusan akan pengurusan berkas yang akan dilayangkan ke disduk capil misalnya kepengurusan e-KTP sehingga masyarakat merasa tidak puas akan pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 002 bahwa pelayanan administrasi kependudukan diketahui masih lambatnya tembusan akan pengurusan berkas yang akan dilayangkan ke disduk capil misalnya kepengurusan e-KTP sehingga masyarakat merasa tidak puas akan pelayanan yang diberikan.

Begitu juga pendapat masyarakat Kelurahan terkait Pelayanan Administrasi kependudukan tepat sasaran, tepat guna dan efisien. Berikut wawancara dengan masyarakat Kelurahan dengan Darwin sebagai berikut:

Sejauh kami belum menerima pelayanan maksimal terutama kepengurusan tembusan e-KTP yang terkadang masih lama dengan alasan tertentu sehingga memperlambat kepengurusannya ke Disduk capil. (Masyarakat Darwin hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa masyarakat belum merasa puas akan pelayanan yang diberikan kantor Kelurahan terutama didalam pelayanan

kepengurusan surat tembusan dari kantor Kelurahan yang akan dibawa ke Disduk capil didalam kepengurusan E-Ktp.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Saputra sebagai berikut:

Ya kepengurusan pelayanan dikantor Kelurahan yang masih lamban terutama didalam pengeurusan surat tembusan e-KTP harus menunggu sampai 2 hari sementara kalau mengurus e-KTP harus ada tembusan dari RT dan kantor Kelurahan, nah ini dikantor Kelurahan yang lama surat tembusannya keluar sehingga menunggu.(Masyarakat Saputra hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kepengurusan pelayanan dikantor Kelurahan yang masih lamban terutama didalam pengeurusan surat tembusan e-KTP harus menunggu sampai 2 hari sementara kalau mengurus e-KTP harus ada tembusan dari RT dan kantor Kelurahan.

Adapun berikut hasil observasi penelitian bahwa pelayanan yang di berikan pemerintah Kelurahan melalui kantor Kelurahan belum maksimal di karenakan masih terdapat berbagai kendala diantaranya yaitu proses pengiriman data yang berkepentingan ke Disduk Capil terkadang lama sehingga harus menunggu dan proses pelayanan di kantor Kelurahan Teluk Belitung kadang tidak tepat waktu dikarenakan jumlah pegawai yang belum memadai didalam memberikan pelayanan.

b. Pendataan Jumlah Penduduk Terdaftar, Pindah, Dan Pendatang Dalam Satu Bulan Tepat Sasaran, Tepat Guna Dan Efisien

Pelaksanaan Administrasi kependudukan tidak terlepas dari Pendataan Jumlah penduduk terdaftar, pindah, dan pendatang yang dilaksanakan oleh

pemerintah Kelurahan dengan tujuan masyarakat yang ada di Kelurahan terdaftar secara keseluruhan. Hal ini pendataan kependudukan oleh pemerintah Kelurahan dilaksanakan di setiap bulannya dengan bekerjasama dengan Rukun Tetangga (RT) sebagai pendataan penduduk terendah di tingkat RT. Didalam hal ini untuk mengetahui pendataan kependudukan yang dilakukan pemerintah Kelurahan maka peneliti melakukan wawancara terhadap informan mengenai pendataan jumlah penduduk terdaftar, Pindah, Dan Pendetang sebagai berikut :

Berikut hasil wawancara dengan Harisman, selaku Lurah didalam pendataan penduduk terdaftar, Pindah, Dan Pendetang sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah melakukan pendataan kependudukan di tingkat Kelurahan mulai penduduk tempatan Pindah, Dan Pendetang dengan tujuan agar penduduk secara menyeluruh terdata dan kami melakukan koordinasi terhadap RT sebagai perpanjangan tangan kami di wilayahnya masing-masing (Harisman selaku Lurah Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pemerintah Kelurahan telah melakukan pendataan kependudukan di tingkat Kelurahan mulai penduduk tempatan Pindah, Dan Pendetang dengan koordinasi dengan RT tujuan agar penduduk secara menyeluruh terdata.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung sebagai berikut :

Ya sejauh ini kami melakukan pendataan kependudukan mulai dari penduduk tempatan, pendatang dan pindah hal ini kami lakukan di setiap bulannya dengan berkoordinasi dengan RT agar pendudukan dapat diketahui secara menyeluruh. (Junaidi selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah Kelurahan telah melakukan pendataan pendudukan mulai dari penduduk tempatan, pendatang dan pindah hal ini kami lakukan di setiap bulannya dengan berkoordinasi dengan RT agar pendudukan dapat diketahui secara menyeluruh.

Begitu juga ungkapan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Ali Mulyadi sebagai berikut:

Pemerintah Kelurahan belum melakukan pendataan kependudukan secara merata dan dilakukan disetiap bulannya melainkan hanya menerima laporan dari RT saja sehingga banyak penduduk yang tidak terdata contohnya penduduk pendatang sehingga terkadang meresahkan masyarakat karena identitasnya tidak jelas.(Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Kelurahan Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas BPD bahwa pemerintah Kelurahan Pemerintah Kelurahan belum melakukan pendataan kependudukan secara merata dan dilakukan disetiap bulannya melainkan hanya menerima laporan dari RT.

Begitu juga wawancara dengan Ketua RT 001 Bapak Hermansyah pendataan penduduk mulai dari penduduk tempatan, Pendatang, dan Pindah dengan bapak Sudioanto sebagai berikut:

Saya sebagai Ketua RT 001 Bapak Hermansyah sudah melakukan pendataan terhadap penduduk yang tempatan dan pindah dan pendatang sebagai pertanggungjawaban tugas saya yang akan saya laporkan ke kantor Kelurahan. (Ketua RT 001 Bapak Hermansyah, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 01 bahwa Ketua RT 001 Bapak Hermansyah sudah melakukan pendataan terhadap penduduk yang tempatan dan pindah dan pendatang sebagai pertanggungjawaban tugas saya yang akan saya laporkan ke kantor Kelurahan.

Begitu juga Wawancara dengan RT 002 didalam pendataan penduduk mulai dari penduduk tempatan, Pendatang, dan Pindah dengan bapak Jamri yang mengatakan :

Sejauh ini saya sudah melakukan pendataan pendudukan mulai dari penduduk tempatan, pendatang, dan pindah, sebagai koordinasi dengan Lurah dan pertanggungjawaban akan tugas. (Ketua RT 002 Bapak Sutanto, Jamri, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 002 sudah melakukan pendataan pendudukan mulai dari penduduk tempatan, pendatang, dan pindah, sebagai koordinasi dengan Lurah dan pertanggungjawaban akan tugas.

Berbeda dengan pendapat masyarakat Kelurahan terkait Pendataan Jumlah penduduk terdaftar, pindah, dan pendatang dalam satu bulan tepat sasaran, tepat guna dan efisien. Adapun berikut wawancara dengan masyarakat dengan Darwin sebagai berikut :

Sejauh Pemerintah Kelurahan belum melakukan pendataan terhadap penduduk yang ada mulai dari penduduk tempatan pendatang dan pindahan dan RT juga tidak terlihat melakukan pendataan penduduk melainkan penduduk didata bagi penduduk yang telah terdaftar memiliki ktp saja. (Masyarakat Darwin hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pemerintah Kelurahan belum melakukan pendataan terhadap penduduk yang ada mulai dari penduduk tempatan pendatang dan pindahan dan RT juga tidak terlihat melakukan pendataan penduduk secara aktif disetiap bulannya.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan dengan Saputra sebgai berikut :

Sejauh ini belum ada dilakukan pendataan oleh pemerintah Kelurahan yang bekerjasama dengan RT didalam pendataan penduduk buktinya masih ada

penduduk pendatang yang belum didata dan penduduk pindah sehingga data kependudukan tidak jelas dan sinkron dengan kenyataannya (Masyarakat Saputra hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Kelurahan Bersama dengan RT didalam pendataan penduduk belum maksimal disetiap bulannya buktinya masih ada penduduk pendatang yang belum didata dan penduduk pindah sehingga data kependudukan tidak jelas dan sinkron dengan kenyataannya.

Berdasarkan observasi bahwa Pemerintah Kelurahan belum efektif didalam melakukan pendataan kependudukan mulai dari penduduk tempatan, Pindah dan pendatang sehingga masih banyak penduduk yang belum terdata dan melakukan tertib Administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa Pemerintah Kelurahan belum melakukan pendataan kependudukan secara tepat sasaran dengan keadaan yang sebenarnya dimana belum merata pendataan penduduk yang dilakukan mulai dari penduduk tempatan, Pindah dan pendatang.

3. Output

Output yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan,; tepat tidaknya sasaran yang dituju, berapa besar sasasran yang tercakup, seberapa banyak kelompok sasarana yang tertangani, seberapa besar kelompok yang terlibat. Sasaran pelayanan kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Kelurahan bersama dengan Lembaga Masyarakat Kelurahan sangat diperlukan dalam pelayanan publik yang memberikan kepuasan bagi masyarakat karena hal ini menjadi bukti serta tindakan

nyata yang dilakukan pemerintah Kelurahan didalam pendataan kependudukan yang ada di Kelurahan tersebut. Sasaran pendataan yang dilakukan Pemerintah Kelurahan dengan melakukan pendataan Masyarakat tempatan, masyarakat yang keluar dan masyarakat pendatang sehingga pemerintah Kelurahan mengetahui berapa jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan tersebut. Kelurahan Teluk Belitung masih banyak masyarakat yang belum terdata hal ini dikarenakan masyarakat belum melakukan pelaporan akan data pribadi terhadap RT/RW setempat sehingga tidak terdata, dan Pemerintah Kelurahan beserta Lembaga Masyarakat Kelurahan RT/RW seharusnya melakukan pendataan disetiap minggunya guna mengetahui penduduk yang ada di sekitarnya dengan tujuan agar diketahuinya identitas penduduk yang mendiami Kelurahan dan Penduduk yang pindah.

a. Terdatanya Jumlah Penduduk Secara Keseluruhan

Pelaksanaan pelayanan yang dilaksana oleh pemerintah Kelurahan dengan melakukan pendataan terhadap Jumlah Penduduk Secara Keseluruhan dan secara merata. Didalam hal ini untuk mengetahui pendataan terhadap Jumlah Penduduk Secara Keseluruhan yang dilakukan pemerintah Kelurahan maka peneliti melakukan wawancara terhadap informan sebagai berikut :

Berikut hasil wawancara dengan Harisman, selaku Lurah didalam pendataan penduduk sebagai berikut:

Saya sebagai Lurah sudah melakukan pendataan penduduk dan Bersama dengan RT setempat meskipun belum dapat kami laksanakan disetiap bulannya akan tetapi kami wajib membuat laporan di setiap tahunnya (Harisman selaku Lurah Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Lurah sudah melakukan pendataan penduduk dan Bersama dengan RT setempat sehingga penduduk terdata secara menyeluruh.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung sebagai berikut :

Didalam pendataan kependudukan kami sebagai pemerintah Kelurahan melakukan pendataan pendudukan mulai dari penduduk tempatan, pendatang dan pindah yang dengan berkoordinasi dengan RT. (Junaidi selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung , hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah Kelurahan melakukan pendataan pendudukan mulai dari penduduk tempatan, pendatang dan pindah yang dengan berkoordinasi dengan RT.

Begitu juga uangkapan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Ali Mulyadi sebagai berikut:

Sejauh ini belum efisiennya Pemerintah Kelurahan belum melakukan pendataan kependudukan melainkan hanya menerima laporan dari RT saja seharusnya pemerintah Kelurahan dapat secara langsung mengecek hasil laporan bulannya RT didalam pendataan penduduk melainkan hanya menerima laporan dari RT saja sehingga kenyataan dialapangan tidak sinkron dengan data yang tertera..(Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Kelurahan Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas BPD bahwa belum efisiennya Pemerintah Kelurahan belum melakukan pendataan kependudukan melainkan hanya menerima laporan dari RT saja.

Begitu juga wawancara dengan Ketua RT 001 Bapak Hermansyah pendataan dengan bapak Sudianto sebagi berikut:

Sejauh ini Ketua RT 001 Bapak Hermansyah sudah melakukan pendataan terhadap penduduk yang tempatan dan pindah dan pendatang sebagai pertanggungjawaban tugas saya yang akan saya laporkan ke kantor Kelurahan. (Ketua RT 001 Bapak Hermansyah, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 01 bahwa Ketua RT 001 Bapak Hermansyah sudah melakukan pendataan terhadap penduduk yang tempatan dan pindah dan pendatang sebagai pertanggungjawaban tugas saya yang akan saya laporkan ke kantor Kelurahan.

Begitu juga Wawancara dengan RT 002 didalam pendataan penduduk mulai dari penduduk tempatan, Pendatang, dan Pindah dengan bapak Jamri yang mengatakan :

Kegiatan pendataan penduduk saya sudah melakukan pendataan pendudukan mulai dari penduduk tempatan, pendatang, dan pindah, sebagai koordinasi dengan Lurah dan pertanggungjawaban akan tugas. (Ketua RT 002 Bapak Sutanto, Jamri, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 002 sudah melakukan pendataan pendudukan mulai dari penduduk tempatan, pendatang, dan pindah, sebagai koordinasi dengan Lurah dan pertanggungjawaban akan tugas.

Berbeda dengan pendapat masyarakat Kelurahan terkait Pendataan penduduk. Adapun berikut wawancara dengan masyarakat dengan Darwin sebagai berikut :

Kenyataan dilapangan bahwa Pemerintah Kelurahan belum melakukan pendataan terhadap penduduk secara merata dan RT jugabelum melakukan pendataan penduduk sebagai perpanjang tangan kepela Kelurahan. (Masyarakat Darwin hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pemerintah Kelurahan belum melakukan pendataan terhadap penduduk secara merata dan RT jugabelum melakukan pendataan penduduk sebagai perpanjang tangan kepela Kelurahan.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan dengan Saputra sebagai berikut :

Pendataan penduduk oleh pemerintah Kelurahan yang berkoordinasi dengan RT belum melakukan pendataan penduduk secara luas dimana masih ada penduduk pendatang yang belum didata dan penduduk pindah (Masyarakat Saputra hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pendataan penduduk oleh pemerintah Kelurahan yang berkoordinasi dengan RT belum melakukan pendataan penduduk secara luas dimana masih ada penduduk pendatang yang belum didata dan penduduk pindah.

Berdasarkan observasi bahwa pendataan penduduk belum terlaksana secara luas oleh pemerintah Kelurahan dimana masih banyak masyarakat Kelurahan yang belum terdata hal dikarenakan belum adanya kegiatan rutinitas yang dilaksanakan Kepela Kelurahan didalam melakukan pendataan penduduk secara menyeluruh.

b. Hasil Laporan Kependudukan

Hasil laporan kependudukan yang dilaksanakan pemerintah Kelurahan dengan tujuan kependataan penduduk secara menyeluruh. untuk mengetahui Hasil laporan Kependudukan terkait Jumlah Penduduk Secara Keseluruhan yang dilakukan pemerintah Kelurahan maka peneliti melakukan wawancara terhadap informan sebagai berikut :

Adapun wawancara yang dilakukan terhadap dengan Lurah bapak Harisman terkait hasil laporan Kependudukan sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah menyediakan laporan kegiatan pendataan penduduk mulai dari tempatan, penduduk pindahan dan penduduk pendatang agar semua penduduk terdata sesuai dengan identitas KTP masing-masing penduduk. (Lurah bapak Harisman, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Lurah sudah menyediakan laporan kegiatan pendataan penduduk mulai dari tempatan, penduduk pindahan dan penduduk pendatang agar semua penduduk terdata sesuai dengan identitas KTP masing-masing penduduk.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung sebagai berikut :

Pemerintah Kelurahan sudah melakukan pendataan penduduk melalui laporan yang data kependudukan di setiap tahunnya. (Junaidi selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas Pemerintah Kelurahan sudah melakukan pendataan penduduk melalui laporan yang data kependudukan di setiap tahunnya.

Begitu juga ungkapan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Ali Mulyadi sebagai berikut:

Sejauh ini pemerintah Kelurahan belum melakukan secara jelas kependataan penduduk didalam hasil laporan tahunan dimana masih banyak penduduk yang belum terdata.(Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Kelurahan Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas BPD pemerintah Kelurahan belum melakukan secara jelas kependataan penduduk didalam hasil laporan tahunan dimana masih banyak penduduk yang belum terdata.

Berikut wawancara dengan Ketua RT 01 terkait Hasil laporan Pendataan Penduduk Sudianto sebagai berikut:

Saya selaku Ketua RT 001 Bapak Hermansyah sejauh ini belum melakukan pendataan terhadap masyarakat secara merata terutama masyarakat pendatang melainkan saya hanya membuat tulisan berbentuk pamlet di dipan Rumah Saya pendatang Wajib Lapor. Akan tetapi kenyataannya masyarakat belum masih belummelapor sehingga belum terdata emang benar sih saya sebagai RT belum emlaksanakan pengawasan akan tetapi apabila ada himbauan dari masyarakat barulah RT langsung melakukan pendataan. (Ketua RT 001 Bapak Hermansyah, Sudianto, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Ketua RT 001 Bapak Hermansyah sejauh ini belum melakukan pendataan terhadap masyarakat secara merata terutama masyarakat pendatang melainkan saya hanya membuat tulisan berbentuk pamlet pendatang Wajib Lapor.

Begitu juga Wawancara dengan RT 002 yang mengatakan :

Sejauh ini saya selaku RT 002 sudah melakukan pendataan penduduk dilingkungan saya mualai dari penduduk tempatatan, penduduk pindah, dan penduduk pendatang, dan saya sudah membuat pamlet bahwa masyarakat pendatang wajib lapor, meskipun terkadang saya tidak sempat mendata dikarenakan penduduk terlihat tidak ada yang pendatang sehingga saya hanya memberikan laporan data sebelumnya. (Ketua RT 002 Bapak Sutanto, Jamri, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pelayanan pendataan kependudukan belum terlaksana tepat sasaran dimana diketahui bahwa Pemerintah Kelurahan dan RT/Rw belum melakukan pendataan terhadap masyarakat tempatan, pindah dan masyarakat pendatang melainkan apabila adanya himbauan dari masyarakat akan penduduk pendatang barulah RT melakukan pendataan, sehingga laporan jumlah penduduk tidak sinkron dengan penduduk di masyarakat.

Berikut wawancara dengan masyarakat masyarakat Kelurahan terkait hasil laporan kependudukan dengan Darwin sebagai berikut:

Sejauh hasil laporan kependudukan belum sinkron dengan kenyataan dilapangan dimana masih banyak penduduk yang belum terdata dan memiliki identitas lengkap. (Masyarakat Darwin hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Sejauh hasil laporan kependudukan belum sinkron dengan kenyataan dilapangan dimana masih banyak penduduk yang belum terdata dan memiliki identitas lengkap.

Begitu hasil wawancara dengan masyarakat dengan Saputra sebagai berikut:

Iya memang benar pemerintah Kelurahan melakukan pendataan kependudukan ditingkat Kelurahan namum hasil laopran yang dilakukan tidak sesuai dengan jumlah penduduk pada kenyataannya.(Masyarakat Saputra hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Kelurahan melakukan pendataan kependudukan ditingkat Kelurahan namum hasil laopran yang dilakukan tidak sesuai dengan jumlah penduduk pada kenyataannya.

Dari observasi yang penulis lakukan bahwa diketahui hasil laporan kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan dan RT belum sinkronnya hasil laporan dengan kenyataannya dimana masih banyak penduduk Kelurahan belum terdata dan belum memiliki identitas tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pelaksanaan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa pelaksanaan pendataan kependudukan oelh pemerintah Kelurahan dengan RT didalam melakukan pendataan masyarakat tempatan, pindah dan masyarakat pendatang belum

terlaksana secara merata sehingga hasil laporan kependudukan tidak sesuai dengan kenyataan dilappangan.

4. *Outcome*

Outcome yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, dengan ada atau tidaknya perubahan pada target/sasaran, seberapa besar perubahan kelompok sasaran, seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dimana Pelaksanaan Administrasi kependudukan di Kelurahan Kampung maju dengan penetapan peraturan sebagai pelaksana kebijakan yang dilaksanakan dan seuai dengan kepentingan masyarakat. Pencapaian kebijakan didasari oleh aturan dan buku panduan agar setiap pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta tidak terjadinya kesalahan atau kelainnya tugas yang dilakukan setiap pegawai.

a. **Buku Administrasi Penduduk Sumber Kebijakan Pemerintah Kelurahan**

Pelaksanaan pencapaian efektivitas didalam pelaksanaan administrasi kependudukan tidak terlepas dari kependudukan panduan buku administrasi penduduk sumber kebijakan pemerintah Kelurahan dengan tujuan menyelaraskan kebijakan dengan upayah penerapan didalam pencapaian pelaksanaan kebijakan Administras Kependudukan. untuk mengetahui Hasil laporan Kependudukan terkait buku Administrasi Penduduk Sumber Kebijakan Pemerintah Kelurahan maka peneliti melakukan wawancara terhadap informan sebagai berikut :

Adapun berikut wawancara dengan Lurah bapak Harisman dan Kasih Kesejahteraan dan pelayanan kantor Kelurahan Junaidi:

Sejauh ini pelaksana kebijakan didalam pelaksanaan adminitrasi penduduk dengan tersedianya peraturan dan buku petunjuk didalam pelaksanaan administrasi penduduk, akan tetapi kebanyakan kami menggunakan peraturan yang ditetapkan karena peraturan yang ada singkron dengan kegiatan yang sekarang, apabila kami terpatok dengan buku sebagai sumber kebijakan takutnya tidak singkron terhadap aturan yang berlaku karena didalam buku kebijakan itu sendiri adalah aturan yang ditetapkan sehingga kami tidak melihat buku kebijakan didalam melakukan kebijakan administrasi kependudukan. (Harisman selaku Lurah Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Sejauh ini pelaksana kebijakan didalam pelaksanaan adminitrasi penduduk dengan berlandaskan peraturan dan buku petunjuk didalam pelaksanaan administrasi penduduk.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung sebagai berikut :

Sejauh ini kami melaksanakan kebijakan Administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku emang perlu juga ada buku panduan didalam melaksanakan administrasi kependudukan sehingga kita tidak terjadi kesalahan didalam upaya-upaya pelaksana kebijakan administrasi penduduk di tegah-tegah masyarakat., hal ini juga dikarenakan tidak adanya buku yang tersedia oleh Pemerintah Kelurahan sehingga harus melihat peraturan yang berlaku. (Junaidi selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung , hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pelaksana kebijakan didalam pelaksanaan adminitrasi penduduk dengan tersedianya peraturan dan buku petunjuk didalam pelaksanaan administrasi penduduk.

Begitu juga ungkapan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Ali Mulyadi sebagai berikut:

Sejauh ini pemerintah Kelurahan didalam melaksanakan kebijakan Administrasi kependudukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan buku panduan didalam melaksanakan administrasi kependudukan. (Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Kelurahan Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pemerintah Kelurahan didalam melaksanakan kebijakan Administrasi kependudukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan buku panduan didalam melaksanakan administrasi kependudukan.

Begitu juga wawancara Ketua RT 001 Bapak Hermansyah didalam pelaksanaan Administrasi kependudukan melalui buku administrasi penduduk sumber kebijakan sebagi berikut:

Sejauh ini pemerintah sudah melakukan pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan aturan dan buku petunjuk emang belum maksimalnya aturan dilaksanakan sehingga hasil pelaksanaan administrasi kependudukan belum terlaksana dengan maksimal. (Ketua RT 001 Bapak Hermansyah, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 01 bahwa pemerintah sudah melakukan pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan aturan dan buku petunjuk.

Begitu juga Wawancara dengan RT 002 yang mengatakan :

Saya perhatikan emang benar pemerintah sudah melakukan pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan aturan dan buku meskipun kenyataannya dilapangan pencapaian kegiatan hasil pelaksanaan administrasi kependudukan belum terlaksana dengan maksimal. (Ketua RT 002 Bapak Sutanto, Jamri, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 002 bahwa pemerintah sudah melakukan pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan aturan dan buku.

Berbeda dengan pendapat masyarakat terkait Buku administrasi penduduk sumber kebijakan pemerintah Kelurahan hal ini di ungkapkan Darwin sebagai berikut:

sejauh ini pemerintah Kelurahan melaksanakan kebijakan Administrasi penduduk belum adanya menggunakan bantuan buku panduan kebijakan Administrasi Penduduk melainkan berdasarkan aturan saja sehingga pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan tidak terlaksana dengan maksimal, dimana masih banyak penduduk yang belum diberikan pelayanan dengan baik, dan belum dilakukannya pendataan bagi penduduk yang ada. (Masyarakat Darwin hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah Kelurahan melaksanakan kebijakan Administrasi penduduk belum adanya menggunakan bantuan buku panduan kebijakan Administrasi Penduduk melainkan berdasarkan aturan saja.

Begitu hasil wawancara dengan Saputra sebagai berikut:

Pelaksanaan kebijakan Administrasi penduduk pendukung didalam pencapaian kinerja Kantor Kelurahan bahwa belum adanya menggunakan bantuan buku panduan kebijakan Administrasi Penduduk melainkan berdasarkan aturan saja. (Masyarakat Saputra hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kebijakan didalam melaksanakan Administrasi Penduduk di Kelurahan Teluk Belitung belum adanya buku petunjuk pelaksana Administrasi Kelurahan dengan tujuan pendukung kegiatan Administrasi penduduk melainkan tidak hanya lewat peraturan dikarenakan apabila adanya buku petunjuk sehingga pegawai secara luas memahami bentuk pelayanan yang akan diberikan, dan kegiatan pendataan penduduk dapat terlaksana dengan maksimal.

Dari observasi yang penulis lakukan bahwa diketahui Pemerintah Kelurahan didalam melaksanakan kebijakan Administrasi penduduk didalam pencapaian kinerja yang cepat dan tepat belum adanya bantuan buku kebijakan Administrasi Penduduk melainkan berdasarkan aturan saja sehingga pelaksanaan

kegiatan Administrasi Kependudukan belum terlaksana dengan maksimal dan pelayanan yang cepat dan tepat.

b. Tergambarnya Potensi Kelurahan

Tergambarnya potensi Kelurahan didalam keberhasilan kegiatan pelaksanaan Administrasi Penduduk di Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. untuk mengetahui Tergambarnya potensi Kelurahan didalam keberhasilan kegiatan pelaksanaan Administrasi Penduduk maka peneliti melakukan wawancara terhadap informan sebagai berikut :

Berikut hasil wawancara dengan Harisman, selaku Lurah sebagai berikut:

Pelaksanaan administrasi Kelurahan sudah terlaksana namun belum didukung oleh potensi Kelurahan yaitu masyarakat Kelurahan yang cenderung cuek akan adanya himbuan dan kebijakan sosialisasi akan tertib administrasi Kelurahan.. oleh masyarakat Didalam pemberian pelayanan Administrasi. (Harisman selaku Lurah Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 09.00 WIB

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pelaksanaan administrasi Kelurahan belum didukung oleh potensi Kelurahan yaitu masyarakat Kelurahan itu sendiri yang cenderung kurang tanggap akan adanya himbuan dan kebijakan sosialisasi akan tertib administrasi Kelurahan yang dilayangkan oleh Pemerintah Kelurahan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung sebagai berikut :

Sejauh ini potensi Kelurahan belum memberikan dukungan akan pelaksanaan administrasi kependudukan akan tetapi kami sebagai pemerintah Kelurahan selalu berusaha memberikan pelayanan Administrasi kependudukan bagi masyarakat Kelurahan. (Junaidi selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa potensi Kelurahan belum memberikan dukungan akan pelaksanaan administrasi kependudukan melalui tanggap akan masyarakat akan tertib administrasi Kependudukan Kelurahan.

Begitu juga ungkapan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Ali Mulyadi sebagai berikut:

Sejauh Gambaran potensi Kelurahan sudah mendukung akan pelaksanaan Administrasi kependudukan memang harus diberikan sosialisasi terus oleh pemerintah Kelurahan sehingga masyarakat tertib akan administrasi kependudukan Kelurahan..(Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Kelurahan Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa gambaran potensi Kelurahan sudah mendukung akan pelaksanaan Administrasi kependudukan akan tetapi perlunya dukungan sosialisasi oleh pemerintah Kelurahan sehingga masyarakat tertib akan administrasi kependudukan.

Begitu juga wawancara Ketua RT 001 Bapak Hermansyah didalam gambaran Potensi Kelurahan sebagai berikut:

Sejauh ini dukungan potensi Kelurahan sudah memberikan pencapaian pelaksanaan administrasi Kelurahan tetapi perlunya pemerintah Kelurahan lebih maksimal didalam melakukan kegiatan pendataan kependudukan secara merata sehingga masyarakat taat akan tertibnya pendataan kependudukan. (Ketua RT 001 Bapak Hermansyah, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa dukungan potensi Kelurahan sudah memberikan pencapaian pelaksanaan administrasi Kelurahan tetapi pemerintah Kelurahan lebih maksimal didalam melakukan kegiatan pendataan kependudukan.

Begitu juga Wawancara dengan RT 002 yang mengatakan :

Sejauh ini perlunya pemerintah Kelurahan didalam menggerakkan masyarakat akan taat tertib kependudukan dan bekerjasama dengan RT

setempat sehingga potensi masyarakat mendukung akan kegiatan yang dilaksanakan. (Ketua RT 002 Bapak Sutanto, Jamri, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pemerintah Kelurahan perlunya menggerakkan masyarakat akan taat tertib kependudukan dan bekerjasama dengan RT setempat sehingga potensi masyarakat mendukung akan kegiatan yang dilaksanakan.

Berbeda dengan pendapat masyarakat terkait tergambaranya potensi Kelurahan didalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan, berikut hasil wawancaradengan masyarakat Kelurahan sebagai berikut:

Sejauh ini gambaran potensi Kelurahan melalui masyarakat setemoat sudah mendukung kegiatan pemerintah Kelurahan akan tetapi pemerintah Kelurahan belum masimal didlam melakukan administrasi kependudukan mulai dari pendataan hingga sosialisasi akan tertib administrasi. (Masyarakat Darwin hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa potensi Kelurahan melalui masyarakat setempat sudah mendukung kegiatan pemerintah Kelurahan akan tetapi pemerintah Kelurahan belum maksimal didalam pelaksanaan administrasi kependudukan Kependudukan mulai dari pendataan hingga sosialisasi akan tertib administrasi. Begitu juga diungkapkan Saputra sebagai berikut:

Sejauh ini belum berlangsungnya kependudukan potensi masyarakat Kelurahan hal ini dikarenakan kurangnya pencapaian akan kinerja pemerintah Kelurahan didalam pelaksanaan Administrasi Kelurahan melalui sosialisasi yang diberikan terhadap masyarakat Kelurahan akan tetribnya administrasi kependudukan dan belum dilakukannya pendataan secara rutin terhadap penduduk Kelurahan. (Masyarakat Saputra hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa belum berlangsungnya kependudukan potensi masyarakat Kelurahan hal ini dikarenakan kurangnya

pencapaian akan kinerja pemerintah Kelurahan didalam pelaksanaan Administrasi Kelurahan melalui sosialisasi dan pendataan secara rutin terhadap penduduk Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pelaksanaan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti cukup baik dimana sudah terlaksananya pelaksanaan administrasi kependudukan melalui peraturan yang ditetapkan dan belum adanya pedoman buku petunjuk didalam pelaksana kebijakan Administrasi penduduk.

Secara menyeluruh diketahui pelaksanaan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti cukup baik akan tetapi belum terlaksana dengan maksimal Hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai secara khusus menangi Administrasi penduduk, tingkat pendidikan atau kualitas dari aparat pemerintahan Kelurahan yang relatif rendah sehingga menyebabkan pelaksanaan administrasi Kependudukan pemerintahan Kelurahan masih mengalami hambatan tentunya dengan pendidikan yang rendah cenderung mengakibatkan kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh aparat pemerintahan Kelurahan didalam melaksanakan pencapaian tugas yang dilaksanakan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki kantor Kelurahan Teluk Belitung sebagai penunjang dalam proses administrasi yang membuat pelaksanaan administrasi kependudukan belum memberikan dukungan didalam pencapaian pelayanan seperti komputer yang tidak memadai, mesin diesel sebagai penyalur listrik dalam keadaan rusak tidak

dapat digunakan, dan ruangan yang sempit didalam memberikan pelayanan kantor Kelurahan, begitu juga bahwa belum meratanya kegiatan sosialisasi terkait terib Administrasi Kependudukan bagi masyarakat pemberian informasih melalui pamplet di tegah masyarakat dan melakukan kegiatan pengundangan masyarakat untuk ikut serta didalam menghadiri rapat yang dilakukan oleh Lurah melainkan hanya himbuan saja melalui RT sehingga masyarakat banyak yang mengetahuinya, dan diketahui tersedianya buku petunjuk pendukung pelaksana kebijakan Administrasi Penduduk sehingga belum memberikan pengetahuan bentuk pembinaan dan pelatihan bagi Pegawai didalam pencapaian pelaksanaan Administrasi Penduduk Kelurahan mulai dari pendataan dan kegiatan sosialisasi bagia masyarakat wajib lapor, dan belum terjalannya kerjasama antara Lurah dengan RT dan mayarakat Kelurahan didalam kerjasama pencapaian Administrasi kependudukan tepat sasaran sehingga kegiatan pelaksanaan Administrasi Kependudukan hanya berlangsung begitu saja tanpa adanya trobosan perubahan yang lebih baik.

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintah (Studi Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Beilitung, Kecaamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti)

Pelaksanaan Administrasi Penduduk Kelurahan teluk Beilitung, Kecaamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti belum optimal dengan baik hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung sebagai berikut :

Kami sudah melakukan tugas kami terutama didalam pelaksanaan adminitrasi kependudukan namun masyarakat belum memberikan dukungan akan tertibnya administrasi kependudukan sehngga masih ada ditemui penduduk yang belum terdata. (Junaidi selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Belitung , hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah Kelurahan sudah melakukan tugas didalam pelaksanaan adminitrasi kependudukan namun masyarakat belum memberikan dukungan akan tertibnya administrasi kependudukan sehngga masih ada ditemui penduduk yang belum terdata.

Begitu juga uangkapan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Ali Mulyadi sebagai berikut:

Sejauh ini kepala Pemerintah Kelurahan belum bekerja dengan maksimal yang seharusnya melakukan pendataan secara langsung terhadap masyarakat namum saya akui pemerintah Kelurahan secara khusus melakukan pendataan di tengah masyarakat masih kurangnya jumlah pegawai sehingga belum meberikan kinerja yang maksimal. (Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Kelurahan Teluk Belitung, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pemerintah Kelurahan belum bekerja dengan maksimal hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai sehingga belum meberikan kinerja yang maksimal.

Begitu juga wawancara Ketua RT 001 Bapak Hermansyah sebagi berikut:

Sejauh ini pelaksanaan administrasi kependudukan RT dengan pemerintah Kelurahan sudah bekerjasama didalam pencapaiannya akan tetapi pemerintah Kelurahan belum secara maksimal didalam koordinasi dengan RT misalnya ketetapan waktu pendataan kependudukan dan usulan pemeberian sanksi bagi masyarakat yang tidak lapor terutama masyarakat pendatang.(Ketua RT 001 Bapak Hermansyah, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pelaksanaan administrasi kependudukan RT dengan pemerintah Kelurahan belum secara maksimal didalam koordinasi dengan RT misalnya ketetapan waktu pendataan kependudukan dan usulan pemeberian sanksi bagi masyarakat yang tidak lapor terutama masyarakat pendatang.

Begitu juga Wawancara dengan RT 002 yang mengatakan :

Iya koordinasi yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan hanya sebatas himbauan pendataan penduduk melainkan tidak adanya troobosan akan upaya atau bentuk pengembangan didalam penanganan akan tertibnya masyarakat dalam pendataan penduduk. (Ketua RT 002 Bapak Sutanto, Jamri, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa koordinasi yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan hanya sebatas himbauan pendataan penduduk melainkan tidak adanya troobosan akan upaya atau bentuk pengembangan didalam penanganan akan tertibnya data penduduk .

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan dengan Darwin sebagai berikut:

Sejauh Pemerintah Kelurahan belum melakukan sosialisasi secara merata terhadap masyarakat didalam penetapan tertib administrasi penduduk, pemerintah Kelurahan belum melakukan pendataan akan penduduk yang adan dan kepengurusan kependudukan oleh masyarakat masih lambat didalam penyelesaiannya dan kurangnya dukungan sarana prasana didalam pelayanan administrasi kependudukan di kantor Kelurahan. (Masyarakat Darwin hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pemerintah Kelurahan belum melakukan sosialisasi secara merata terhadap masyarakat didalam penetapan tertib administrasi penduduk, melakukan pendataan penduduk dan diketahui

kepengurusan pelayanan pendataan kependudukan masih lambat dan kurangnya dukungan sarana prasana. Begitu juga diungkapkan Saputra sebagai berikut:

Pencapaian keberhasilan pelaksanaan administrasi kependudukan belum terlaksana hal ini dikarenakan Pemerintah Kelurahan belum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan tertib administrasi penduduk, melakukan pendataan penduduk dan kurangnya dukungan sarana prasana pelayanan Administrasi penduduk. Penyediaan sarana prasarana oleh kantor Kelurahan terlihat belum tersedia (Masyarakat Saputra hari Rabu, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kelurahan belum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan tertib administrasi penduduk, melakukan pendataan penduduk dan kurangnya dukungan sarana prasana pelayanan Administrasi penduduk. Penyediaan sarana prasarana.

Berdasarkan observasi, maka peneliti berpendapat bahwa Pelaksanaan Administrasi Penduduk Di Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum maksimalnya pelaksanaan Administrasi kependudukan melalui koordinasi dengan RT dengan melakukan sosialisasi dan pendataan sampai dengan pencapaian kegiatan pelayanan yang diberikan bagi masyarakat hal ini dikarenakan :

1. Tingkat pendidikan atau kualitas dari aparat pemerintahan Kelurahan yang relatif rendah sehingga menyebabkan pelaksanaan administrasi Kependudukan pemerintahan Kelurahan belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan dengan pendidikan yang rendah cenderung mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesiapan serta kemampuan yang dimiliki oleh aparat pemerintahan Kelurahan didalam melaksanakan pencapaian tugas yang dilaksanakan.

2. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki kantor Kelurahan Teluk Belitung sebagai penunjang dalam proses administrasi yang membuat pelaksanaan administrasi kependudukan belum optimal meliputi ketersediaan komputer sebanyak 3 unit dimana 1 kurang berfungsi sehingga kurang mendukung kegiatan pengimputan pendataan kependudukan, kemudian adanya mesin diesel sebagai penyalur listrik apabila listrik padam akan tetapi mesin diesel tersebut dalam keadaan rusak tidak dapat digunakan, penyediaan ruangan pelayanan masyarakat dimana masih terlihat sempit dan penyediaan tempat duduk belum memadai didalam pemberian pelayanan.
3. Belum meratanya kegiatan sosialisasi terkait terib Administrasi Kependudukan bagi masyarakat pemberian informasi melalui Pamphlet di tengah masyarakat dan melakukan kegiatan pengundangan masyarakat untuk ikut serta didalam menghadiri rapat yang dilakukan oleh Lurah melainkan hanya himbuan saja melalui RT sehingga masyarakat banyak yang mengetahuinya.
4. Belum tersedianya Buku petunjuk pendukung pelaksana kebijakan Administrasi Penduduk sehingga belum memberikan pengetahuan bentuk pembinaan dan pelatihan bagi Pegawai didalam pencapaian pelaksanaan Administrasi Penduduk Kelurahan mulai dari pendataan dan kegiatan sosialisasi bagia masyarakat wajib lapor.
5. Belum terjalinnya kerjasama antara Lurah dengan RT dan masyarakat Kelurahan didalam kerjasama pencapaian Administrasi kependudukan tepat sasaran.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis telah lakukan tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan hasil penelitian melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Administrasi Penduduk Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti melalui indikator Input, Proses, *Output*, dan *Outcome* bahwa Pelaksanaan Administrasi Penduduk Kelurahan belum terlaksana dengan optimal hal ini dapat diketahui melalui indikator Input bahwa kemampuan pemerintah Kelurahan didalam pelaksanaan Administrasi Kelurahan belum terlaksana dengan maksimal hal ini dikarenakan belum dilakukannya pendataan dan pengawasan secara langsung ke tengah masyarakat akan kependataan penduduk sehingga sehingga masyarakat masih ditemui belum terdata serta belum adanya kerjasama Pemerintah Kelurahan dengan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan melalui RT dalam melakukan sosialisasi dan himbauan terhadap masyarakat melalui himbauan secara langsung, pamphlet atau baliho di setiap RT akan informasih pendataan kependudukan sehingga masyarakat tidak mengetahui akan wajib melaporkan identitas kependudukannya, berdasarkan indikator Proses bahwa keberlasungan

elayanan administrasi kependudukan secara langsung di kantor Kelurahan bahwa kantor Kelurahan belum memberikan pelayanan secara maksimal dimana diketahui kurangnya kependudukan pelayanan sarana prasarana kantor Kelurahan seperti ruangan pemohon pelayanan yang kurang memadai sehingga masyarakat masih ditemui harus antri menunggu dilayani, dan loket penerima layanan belum ada secara khusus melainkan menerima pelayanan secara umum hanya satu loket saja, berdasarkan indikator *Output* bahwa pemerintah Kelurahan belum secara langsung turun didalam melakukan kependataan dan pengawasan penduduk Kelurahan melainkan hanya menerima hasil laporan pendataan dari setiap RT sehingga masih banyak penduduk yang belum terdata, dan berdasarkan indikator *Outcome* bahwa kependudukan keberhasilan pelaksanaan pelayanan Administrasi kependudukan melalui buku pendukung pelaksana administrasi kependudukan Kelurahan belum dijadikan sebagai pendukung pencapaian keberhasilan administrasi kependudukan Kelurahan melainkan sebatas buku pengangan kantor Kelurahan didalam pelaksana administrasi kependudukan Kelurahan.

2. Berdasarkan hasil penelitian adapun hambatan dalam Pelaksanaan Administrasi Penduduk Kelurahan teluk Beilitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti diketahui bahwa Pegawai belum memiliki kemampuan didalam pelaksanaan administrasi Penduduk hal ini dikarenakan rata-rata memiliki tingkat pendidikan tergolong rendah, belum tersedianya pelayanan administrasi kependudukan mulai dari computer, mesin ketik, ruang tunggu, dan loket penerima layanan, masih kurangnya kerjasama Pemerintah Kelurahan

dengan Lembaga masyarakat Kelurahan RT/RW dalam mendata penduduk Kelurahan secara langsung di tengah masyarakat, dan belum tersedianya secara khusus buku pendoman pelaksana kebijakan Administrasi penduduk sebagai buku pendukung kegiatan pelaksanaan Administrasi penduduk di Kelurahan.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah Kelurahan mengikuti pelatihan guna meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan Administrasi kependudukan.
2. Perlunya Pemerintah Kelurahan bersama Lembaga Masyarakat Kelurahan bekerjasama dalam melakukan sosialisasi terkait tertib Administrasi Penduduk mulai dari penduduk lahir, meninggal, tempatan, pendudukan pindah dan pendatang.
3. Sebaiknya Pemerintah Kelurahan menyediakan sarana prasarana yang tepat guna dan dapat digunakan didalam memberikan pelayanan Administrasi kependudukan seperti penyediaan komputer, ruang pelayanan, kursi tunggu dan loket pelayanan.
4. Sebaiknya Pemerintah Kelurahan bekerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan melalui RT dengan melakukan pendataan penduduk secara langsung guna mengetahui penduduk di setiap RT.
5. Sebaiknya Pemerintah Kelurahan menerapkan buku panduan kebijakan Administrasi Penduduk sebagai pendukung kegiatan pegawai didalam melaksanakan kinerjanya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Dunn, William N. 2003. Pengantar *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Rauf Rahyunir, 2005 “*Kelembagaan RT dan RW*”.Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
- Riant Nugroho 2004, *Kebijakan publik: Formulasi dan Evaluasi*. PT, Elex Media Kompotindo. Jakarta.
- Rasyid. M, Ryas. 2005. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yasif Wtampone.
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Raja Grando Persada.
- Sutopo dan sugiyanto, 2001, *analisis kebijakan public*, lembaga Administrasi Negara,Jakarta.
- Santoso, 1995, *Pembinaan Dalam Organisasi*. Jakarta,Gramedia Pustaka.
- _____, 2000.*Pembinaan dalam Organisasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- _____.2006. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Rafika Adita.
- _____.2007. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- _____.2011. *Sistem Pemerintahan IndonesiaI*. Jakarta:Rineka Cipta.
- _____.2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. PT. Gelora Aksara Pratama.

- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecapatan (PATEN))*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Moenir, A.S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2005. *Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit Grasindo : Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- .Thoha, Miftah, 1998. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta, Rajawali.
- _____, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta, Kencana.
- Yusoff, Agus dan Yusran, Andi, 2007. *Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas Ke Otonomi Terpimpin*. Pekanbaru : Suska Press dan ReD PoSt Press.
- Wasistiono, Sadu, dan Etin Indrayani, 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan Bandung*. CV. Fokus Media.
- Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar

B. Prundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang, Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau